



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NGADINO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **624833**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.000.000.000**

1. Tanah Seluas 590 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 875 m2/140 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/84 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 219.000.000**

1. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T / SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T / SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA NF12A1CF M/T / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, HONDA AGYA 1.0 G M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS AYLTA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.289.605
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.272.289.605
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.272.289.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.